

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan penelitian disimpulkan bahwa manajemen keuangan sumbangan BP3 di SMK 2 dan SMK 9 Semarang belum sesuai dengan yang diharapkan karena sumbangan BP3 baru berperan kurang lebih 25% (gaji dan tunjangan) dan kurang lebih 50% (non gaji dan tunjangan) dalam menunjang program pendidikan, disamping itu juga diindikasikan dari (1) strategi penggalan dana masih tertuju pada orangtua siswa, (2) perencanaan dalam menggali sumbangan BP3 belum sesuai dengan harapan karena keterlibatan orangtua masih rendah, (3) sumber dana yang dapat digali hanya dari orangtua, sedang masyarakat lain belum, (4) penggunaan yang tidak jelas antara sumbangan rutin dan pembangunan, (5) pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan sumbangan BP3 masih menghadapi masalah yaitu belum merupakan evaluasi.

Kesimpulan penelitian secara khusus disajikan sebagai berikut:

1. Strategi dan Perencanaan dalam Menggali Sumbangan BP3 di SMK 2 dan SMK 9 Semarang

Strategi untuk menarik sumbangan BP3 rutin yang menjamin ketepatan waktu dilakukan dengan jalan pada kartu pembayaran diberi peringatan bahwa pembayaran dilakukan

setiap bulan paling lambat tanggal 10. Untuk meningkatkan penerimaan, strategi yang dipergunakan adalah dengan menggali sumber-sumber sumbangan lain-lain. Strategi untuk menggali sumbangan pembangunan di SMK 2 Semarang dilakukan dengan mengadakan wawancara kepada orangtua sebelum siswa diterima, yaitu tentang kesanggupan memberikan sumbangan pembangunan. Sedang di SMK 9 Semarang dilakukan dengan pola yang rutin dan umum ditempuh, yaitu setelah siswa dinyatakan diterima, orangtua diundang rapat kemudian disampaikan anggaran yang dibutuhkan dibagi jumlah siswa yang diterima.

Perencanaan untuk menggali sumbangan BP3 di SMK 2 Semarang berwujud RAPBS untuk sumbangan rutin, sedang sumbangan pembangunan berwujud RAP. Di SMK 9 Semarang untuk sumbangan rutin maupun pembangunan dalam bentuk RAPBS. Penyusunan RAPBS cenderung rutinitas dari pengalaman tahun yang lalu ke tahun berikutnya.

Proses penyusunannya dimulai dari sekolah ke Pengurus BP3, kemudian pengesahan oleh Pengawas sekolah dan Kepala Kantor Depdikbud Kodya Semarang, selanjutnya diplenokan dengan orangtua. Dalam perencanaan penggalian sumbangan BP3 saling percaya antara sekolah dan Pengurus BP3, dan harus ada persetujuan dari Pengawas sekolah dan Kepala Kantor Depdikbud Kodya, dan keterlibatan orangtua datang rapat untuk menyetujui kesepakatan bukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan.

2. Sumber Dana yang Dapat Digali Oleh BP3 SMK 2 dan SMK 9 Semarang

Berdasarkan Keputusan Mendikbud RI nomor 0293/U/1993 juncto Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Tengah nomor 0841/I03/97 sumbangan BP3 terdiri dari iuran orangtua Rp 3.000,00; sumbangan sukarela Rp 4.000,00; dan sumbangan pembangunan (tidak mengikat). Disamping sumbangan rutin masih ada sumbangan lain-lain yaitu: tabungan wisata, koperasi, OSIS, perpustakaan, praktik di dunia usaha (PSG). Untuk SMK 2 masih ada praktik komputer, Bapopsi, STP2K, RAPBK. Sumber dana tersebut berasal dari orangtua siswa, sedang masyarakat yang lain belum tergali.

3. Penerimaan dan Penggunaan Sumbangan BP3 di SMK 2 dan SMK 9 Semarang

Penerimaan sumbangan BP3 di SMK 2 Semarang selama tahun pelajaran 1995/1996 adalah Rp 146.687.210,00. Penerimaan pada tahun pelajaran berikutnya (1996/1997) Rp 168.482.570,00. Jadi penerimaan sumbangan BP3 tahun pelajaran 1995/1996 ke 1996/1997 naik 14,86%. Faktor penyebab kenaikan tersebut adalah keberhasilan strategi yang digunakan dan kesadaran dari orangtua siswa.

Penggunaan sumbangan antara rutin dan pembangunan tidak jelas, hal ini nampak pada pembagian prosentase penggunaan dana yang bersumber dari iuran orangtua dan sumbangan sukarela (rutin). Demikian juga halnya dengan

sumbangan pembangunan yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pengadaan barang digunakan untuk mensubsidi kegiatan rutin.

Kecenderungan penggunaan sumbangan BP3 dari yang terbesar ke yang terkecil adalah untuk honorarium dan kesejahteraan, kegiatan belajar mengajar, pembangunan dan pengadaan barang, program BP3, dan kegiatan pelajar.

Penerimaan sumbangan BP3 di SMK 9 Semarang selama tahun pelajaran 1995/1996 adalah Rp 59.016.000,00. Penerimaan pada tahun pelajaran 1996/1997 Rp 69.269.983,00. Jadi penerimaan sumbangan BP3 tahun pelajaran 1995/1996 ke 1996/1997 naik 14,80%. Faktor penyebab kenaikan tersebut adalah keberhasilan strategi yang digunakan dan kesadaran orangtua.

Kecenderungan penggunaan sumbangan BP3 dari yang terbesar ke yang terkecil adalah untuk honor/kesejahteraan, pengadaan barang, program BP3, perbaikan, kegiatan belajar mengajar, kegiatan pelajar, dan kas BP3.

Hambatannya dalam penerimaan dan penggunaan adalah hambatan wajar yaitu keterlambatan, dan pengajuan keringanan setelah tahun pelajaran berjalan.

4. Pertanggungjawaban Penerimaan dan Penggunaan Sumbangan BP3

Pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan dalam bentuk laporan keuangan untuk jangka waktu tertentu diadakan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa. Laporan keuangan

setiap tahun disampaikan kepada orangtua siswa dalam bentuk global dalam rapat BP3. Laporan keuangan juga disampaikan kepada Kepala Kantor Depdikbud Kodya/Kabupaten setiap bulan. Khusus di SMK 2 Semarang sumbangan pembangunan dipertanggungjawabkan langsung kepada orangtua siswa. Pertanggungjawaban belum merupakan alat evaluasi bagi perencanaan dalam RAPBS, karena pada perencanaan terdapat prosentase untuk beberapa kebutuhan, sedang pada pertanggungjawaban tidak tampak. Sumbangan pembangunan yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pengadaan barang ternyata juga digunakan untuk kegiatan rutin.

Model manajemen keuangan sumbangan BP3 empirik perlu disesuaikan dengan manajemen keuangan ideal uang sekolah siswa (tuition charges, student fees) mengingat sumbangan BP3 merupakan sumbangan wajib yang harus dibayar oleh orangtua siswa, dan kepercayaan orangtua siswa kepada sekolah dan pengurus BP3.

B. Rekomendasi

Secara umum rekomendasi yang dapat disampaikan dalam manajemen keuangan sumbangan BP3 adalah perlu keterbukaan dalam perencanaan dan pertanggungjawaban sehingga peran orangtua dalam membayar uang sekolah semakin tepat waktu dan meningkat jumlahnya yang pada gilirannya akan meningkatkan peran sumbangan BP3 dalam pelaksanaan program pendidikan.

Secara khusus rekomendasi yang dapat disampaikan

adalah: (1) Menggali sumbangan BP3 perlu dikembangkan kreatifitas, proaktif yang tertuju pada orangtua siswa dan masyarakat. SMK 9 Semarang perlu mempelajari strategi yang dikembangkan SMK 2 Semarang dalam menggali sumbangan pembangunan karena dengan wawancara sebelum diterima menjadi siswa 80% sumbangan pembangunan dapat terkumpul, dengan memperhatikan komunikasi yang jelas antara orangtua calon siswa dengan sekolah maupun Pengurus BP3. (2) Keterlibatan orangtua diperlukan dalam proses perencanaan sehingga tidak terkesan datang rapat untuk menyetujui, untuk itu RAPBS sebelum diajukan ke Kepala Kantor Depdikbud perlu didiskusikan terlebih dahulu dengan orangtua. (3) Pengambil kebijakan hendaknya perlu berbesar hati untuk merivisi kebijakannya yang berkaitan dengan iuran orangtua dan sumbangan sukarela termasuk juga SPP karena pengeluaran orangtua tersebut bukan sukarela lagi tetapi sudah merupakan kewajiban. Untuk itu perlu penetapan atas dasar rasional yaitu dengan merubah sumbangan menjadi uang sekolah siswa yang besarnya tentunya disesuaikan dengan kebutuhan, laju inflasi, dan kemampuan orangtua siswa. Dengan melegalisasi uang sekolah siswa maka tidak muncul sumbangan lain-lain. Disamping itu juga perlu aturan yang tegas tentang penggunaan sumbangan baik itu rutin maupun pembangunan, prosentase, dan perincian penggunaan. Terbatasnya dana pemerintah maka perlu dipikirkan "sekolah swadana" dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan

sekolah negeri di Indonesia. (4) Menggiatkan kerja Tim Pemeriksa yang dipantau oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Depdikbud. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan orangtua terhadap sekolah maupun pengurus BP3. Dengan pemeriksaan oleh Akuntan Publik (external auditing) maka Tim Pemeriksa (Pengurus BP3) maupun sekolah akan melaksanakan tugas dengan jujur dan tanggungjawab.



